

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
PT KERETA API INDONESIA TERHADAP KARYAWAN DI USIA
PENSIUN**

**(STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
428K/Pdt.Sus-PHI/2021)**

Disusun oleh:

Dinda Destia Dwiferdiani

NIM: 183112330050120



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2023

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
PT KERETA API INDONESIA TERHADAP KARYAWAN DI USIA
PENSIUN**

**(STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
428K/Pdt.Sus-PHI/2021)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL ACCOUNTABILITY OF PT KERETA
API INDONESIA TOWARDS EMPLOYEES AT RETIREMENT AGE
(CASE STUDY: SUPREME COURT DECISION NUMBER 428K/Rev.Sus-
PHI/2020)*

Dinda Destia Dwiferdiani

183112330050120

**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2023

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT KERETA API
INDONESIA TERHDAPA KARYAWAN DI USIA PENSIUN (STUDI KASUS : PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 428K/Pdt.Sus-PHI/2021)

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Nasional.

Jakarta , 24 Januari 2023

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing



(Pro. Dr.Basuki Rekso Wibowo,S.H.,M.S.i)



(Masidin,S.H.,M.H)



TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dinda Destia Dwiferdiani
Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330050120
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Perdata
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN
HUKUM PT KERETA API
INDONESIA TERHADAP
KARYAWAN DI USIA PENSIUN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan
Nomor 428K/Pdt.Sus-PHI/2021)**

Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi pada tanggal 27 Februari 2023 Sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Skripsi.

Jakarta, 28 Februari 2023

Pembimbing,

Masidin S.H., M.H

Tim Penguji,

Ketua

Dr. Mustakim, S.H., M.

Anggota

Rumainur, S.H., M.H.

Anggota

Masidin, S.H., M.H.



TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT KERETA API INDONESIA
TERHADAP KARYAWAN DI USIA PENSIUN (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Nomor 428K/Pdt.Sus-PHI/2021)**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 27 Februari 2023 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A dan predikat sangat memuaskan.

Jakarta, 28 Februari 2023

Mengetahui,

Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S

Pembimbing,

Masidin, S.H., M.H.



Tim Penguji,

Ketua

Anggota

Anggota

Dr. Mustakim, S.H., M.H.

Rumainur, S.H., M.H.

Masidin, S.H., M.H.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Dinda Destia Dwiferdiani

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Desember 1999

Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330050120

Fakultas : Hukum

Alamat : Jalan Otista 1A No 10 RT 02/RW01 Kelurahan Bidarara Cina
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, 13330

Handphone : 081386221225

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT KERETA API INDONESIA TERHADAP KARYAWAN DI USIA PENSIUN (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 428K/Pdt.Sus-PHI/2021)** adalah benar karya saya sendiri dan belum di publikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan atau menggunakan penelitian lapangan. Bila kemudian terbukti skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan darisiapapun.

Jakarta, 24 Januari 2023
(Dind.  ii)
METERAI TEMPEL
617AKX304076119

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional
Program Studi Ilmu Hukum
Skripsi, (24 Januari 2023)

- A. Nama Penulis : Dinda Destia Dwiferdiani
B. NPM : 183112330050120
C. Judul Tesis : TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG
JAWABAN HUKUM PT KERETA API
INDONESIA TERHADAP KARYAWAN DI USIA
PENSIUN (STUDI KASUS: PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 428K/Pdt.Sus-
PHI/2021)
D. Jumlah Halaman : xii halaman dan 93 halaman, 2023
E. Isi Abstrak :

Seseorang yang bekerja dengan orang lain akan menimbulkan suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja. Dengan adanya suatu perjanjian kerja maka timbulah hak dan juga kewajiban kepada seseorang pengusaha dan juga pekerja. Akan tetapi, Ketika hubungan kerja tersebut berakhir masih ada beberapa perusahaan yang kerap kali tidak memenuhi kewajibannya sebagai pengusaha, yaitu tidak memberikan keadilan secara normatif berupa kekurangan jumlah uang pesangon kepada pekerja yang sudah pensiun. Hal ini sangat disayangkan, karena dapat dikatakan bahwa uang pesangon merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketengakerjaan dan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani pemberian jumlah uang pesangon tidak jarang menjadi potensi perselisihan yang berujung pada ketidaksesuaian pertanggung jawaban hukum yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan menurut Undang-Undang yang berlaku. sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg, yang dimana dalam kasus tersebut seorang pekerja yang mengalami kekurangan pembayaran uang pesangon akibat kelalaian perusahaan dalam membuat perjanjian kerja yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap karyawan PT. Kereta Api Indonesia yang mengalami keterlambatan kekurangan jumlah uang pesangon? Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 428K/Pdt.Sus-PHI/2021?. Metode penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada karyawan PT. Kereta Api Indonesia belum sesuai dengan teori pertanggungjawaban hukum represif yang bertujuan untuk menjaga hak normatifnya sesuai dengan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Kereta Api Indonesia dalam putusan nomor 428K/Pdt.Sus-PHI/2021 belum sesuai.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja,
Pembayaran Uang Pesangon**

F. Daftar Pustaka : 23 buku (1997-2021)
G. Dosen Pembimbing : Masidin, S.H., M.H



ABSTRACT

*National University Undergraduate Program
Legal Studies Program
Thesis, (January 24th 2023)*

- A. *Author's Name* : Dinda Destia Dwiferdiani
B. *Student ID* : 183112330050120
C. *Title of Thesis* : *JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL ACCOUNTABILITY OF PT KERETA API INDONESIA TOWARDS EMPLOYEES AT RETIREMENT AGE(CASE STUDY: SUPREME COURT DECISION NUMBER 428K/Rev.Sus-PHI/2020)*
D. *Number of Pages* : *xii pages and 93 pages, 2023*
E. *Abstract Contents* :

Someone who works with other people will create a work agreement between employers and workers. With the existence of an employment agreement, rights and obligations arise for both an employer and an employee. However, when the employment relationship ends there are still several companies that often do not fulfill their obligations as entrepreneurs, namely they do not provide normative justice in the form of a lack of severance pay to retired workers. This is very unfortunate, because it can be said that severance pay is a very crucial issue in the field of employment and even if it is not professional in handling the amount of severance pay it is not uncommon for it to become a potential dispute which leads to incompatibility of legal responsibilities carried out by the company to employees according to applicable law. as happened in Decision Number 149/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg, where in that case a worker experienced a shortage of severance pay due to the company's negligence in making a work agreement that was contrary to higher regulations. The problem in this study is how is the legal responsibility of the employees of PT. Indonesian Railways experiencing delays, lack of severance pay? What are the judges' legal considerations for the Supreme Court decision Number 428K/Pdt.Sus-PHI/2021? This research method is to use normative juridical research using secondary data. The results of the study state that the legal liability given to employees of PT. Kereta Api Indonesia is not yet in accordance with the theory of repressive legal liability which aims to safeguard its normative rights in accordance with Article 156 paragraphs (2), (3), (4) of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Judgment of judges who granted the cassation request from the cassation applicant PT. Indonesian Railways in decision number 428K/Pdt.Sus-PHI/2021 is not appropriate.

Keyword: Legal Liability, Termination of Employment, Severance Payment

F. *Bibliography* : 23 books (1997-2021)
G. *Advisor* : Masidin, S.H., M.H



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Pertanggung jawaban Hukum PT Kereta Api Indonesia Terhadap Karyawan Di Usia Pensiun (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 428K/Pdt.Sus-PHI/2021)**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Sarjana Hukum Universitas Nasional.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terpelajar Masidin, S.H., M.H., sebagai pembimbing Penulis yang telah banyak memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penyusunan Skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis yang terpelajar dan terpuji, Sundoro Adi S.H., M.H dan Susi Sulastri yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis.

Pada kesempatan ini Penulis sampaikan ucapan terima kasih juga kepada para pihak yang telah memberikan bantuan baik moril dan materiil dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A. Rektor Universitas Nasional.
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Dr. Mustakim, S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Masidin, S.H., M.H., Ketua KaProdi Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi Penulis.

5. Dosen Fakultas Hukum, Program Sarjana, Universitas Nasional
6. Pak Nana dan Pak Fitri staff Sekretariat Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional yang selalu membantu Penulis untuk mendapatkan informasi-informasi seputar perkuliahan
7. Kakak dan Adik Penulis, Syafira Annisa Ferdiani S.KM dan Aryo Naufal Adi Sulastyo yang selalu mendoakan Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini
8. Egi Dwi Rahadian, S.T., yang selalu setia mendukung penulis untuk menyelesaikan S1 ini.
9. Teman S1 Fakultas Hukum Universitas Nasional angkatan 2018 Grazela Renata Bunga Timorestha Balthazar S.H., Laisa Nurlillah, Stevie Zahrein Susmita, Safira Azania Fabanyo
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu Penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 24 Januari 2023

Dinda Destia Dwiferdiani

DAFTAR ISI

JUDUL	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Manfaat Penelitian.....	12
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konseptual.....	15
E. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis Bahan Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Analisis Data.....	22
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II	25
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PADA USIA PENSIUN	25
A. Pemutusan Hubungan Kerja	25
1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja.....	25
2. Alasan-Alasan Pemutusan Hubungan Kerja	28
3. Larangan-Larangan Pemutusan Hubungan Kerja	33

4. Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja.....	35
5. Hak- Hak Pekerja Setelah di PHK.....	39
B. Pertanggung Jawaban Hukum PT Kereta Api Indonesia Dalam Menghadapi Karyawan Di Usia Pensiun	43
1. Pengertian Pertanggung Jawaban Hukum.....	43
BAB III.....	52
FAKTA HUKUM MENGENAI PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM.....	52
PT KERETA API INDONESIA DALAM MENGHADAPI USIA PENSIUN.....	52
1. Para Pihak	52
A. Pemohon (Penggugat).....	52
B. Termohon (Tergugat)	52
2. Kasus Posisi	53
3. Resume Petitum	56
4. Resume Terhadap Jawaban Tergugat	58
5. Resume Pertimbangan & Putusan Hakim.....	60
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri	60
D. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	62
6. Amar Putusan Hakim.....	64
a Dalam Putusan Pengadilan Negeri	64
b Dalam Putusan Mahkamah Agung Amar putusan pada nomor 428K/Pdt.sus-PHI/2021.....	65
BAB IV.....	68
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM.....	68
PT KERETA API INDONESIA TERHADAP KARYAWAN DI USIA PENSIUN. 68	68
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor.428 K/Pdt.Sus-PHI/2021).....	68
A. Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum PT Kereta Api Indonesia Terhadap Karyawan Yang Memasuki Masa Pensiun.....	68
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 428/K./Pdt.Sus-PHI/2021	76
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88